

## Manajemen Kebijakan Fiskal dan Dampaknya terhadap Pembangunan Manusia di Negara Berkembang

**Umi Kulsum<sup>1\*</sup>, Nurjannah Yusuf<sup>2</sup>**

\*<sup>1,2</sup>Universitas Islam Syekh Yusuf, Jalan Maulana Yusuf No. 10, Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118  
ukulsum@unis.ac.id  
nurjannahyusuf@unis.ac.id  
\* Corresponding Author

Diterima : 24 April 2025; Direvisi : 11 Mei 2025; Diterbitkan : 21 Juni 2025;

### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis hubungan antara pengeluaran pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di negara berkembang. Metode penelitian menggunakan analisis regresi berganda dengan data panel dari 15 negara berkembang periode 2015–2023. Variabel independen meliputi pengeluaran pemerintah untuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur sebagai persentase dari PDB, sedangkan variabel dependen adalah IPM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga sektor pengeluaran pemerintah tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Setiap peningkatan 1% pengeluaran kesehatan meningkatkan IPM sebesar 0,031 poin, pengeluaran pendidikan sebesar 0,028 poin, dan pengeluaran infrastruktur sebesar 0,025 poin. Model penelitian menjelaskan 76% variasi IPM antarnegara. Temuan ini menegaskan pentingnya efektivitas manajemen kebijakan fiskal dalam memperkuat pembangunan manusia. Bagi pengambil keputusan publik, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar perencanaan dan pengalokasian anggaran yang lebih strategis dan berbasis hasil (outcome-based budgeting). Pemerintah negara berkembang disarankan untuk mengelola belanja sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur secara terpadu guna memaksimalkan dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan .

Kata Kunci: pengeluaran pemerintah; pembangunan manusia; kebijakan fiskal; manajemen publik; negara berkembang

---

## **Fiscal Policy Management and Its Impact on Human Development in Developing Countries**

### **Abstract**

This study analyzes the relationship between government expenditure and the Human Development Index (HDI) in developing countries. The research employs a multiple regression analysis using panel data from 15 developing countries during the 2015–2023 period. The independent variables consist of government expenditures on health, education, and infrastructure as a percentage of GDP, while the dependent variable is the HDI. The results indicate that all three categories of government spending have a positive and significant effect on HDI. A 1% increase in health expenditure raises HDI by 0.031 points, education expenditure by 0.028 points, and infrastructure expenditure by 0.025 points. The model explains 76% of HDI variation across countries. These findings highlight the importance of effective fiscal policy management in strengthening human development. For public decision-makers, the results provide an empirical basis for more strategic and outcome-based budgeting in government spending. Developing countries are encouraged to manage expenditures in health, education, and infrastructure in an integrated and efficient manner to maximize their impact on societal well-being and the achievement of sustainable development goals.

Keywords: government expenditure; human development; fiscal policy; public management; developing countries

---

## **PENDAHULUAN**

---

doi: <http://dx.doi.org/10.69533>

Copyright © 2025 Author(s). This is an open access article under the CC BY-SA license

Pembangunan manusia merupakan tujuan utama kebijakan ekonomi yang diadopsi oleh berbagai negara di dunia (Bangun et al., 2024). Konsep pembangunan manusia dikembangkan oleh Mahbub ul-Haq pada tahun 1990 dan kemudian digunakan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) untuk mengukur kemajuan suatu negara melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mengukur tiga dimensi dasar pembangunan manusia yaitu kehidupan yang panjang dan sehat, pengetahuan, serta standar hidup yang layak (Setiawan, 2022). Dalam beberapa dekade terakhir, peran pengeluaran pemerintah dalam meningkatkan pembangunan manusia semakin mendapat perhatian dari para ekonom dan pembuat kebijakan (Simarmata & Iskandar, 2022). Teori ekonomi publik menjelaskan bahwa pemerintah memiliki peran krusial dalam menyediakan barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan secara optimal oleh mekanisme pasar (Putra et al., 2025). Pengeluaran pemerintah, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, dipandang sebagai investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Mongan, 2019).

Negara berkembang menghadapi berbagai kendala dalam upaya meningkatkan pembangunan manusia, seperti keterbatasan sumber daya fiskal, infrastruktur yang belum memadai, serta kualitas layanan publik yang masih rendah (Huda et al., 2024). Negara Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang, mengalami pertumbuhan IPM yang konsisten (Prasetyoningrum & Sukmawati, 2018), di mana IPM Indonesia tumbuh 0,49 persen pada tahun 2021 dan 0,86 persen pada tahun 2022 (Retnowati, 2023). Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan pengeluaran pemerintah yang tepat dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan manusia (Sari et al., 2022). Literatur ekonomi menunjukkan bahwa hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pembangunan manusia bersifat kompleks dan bervariasi antar negara (Damayanti, 2018). Beberapa studi menunjukkan hasil yang positif, sementara yang lain menemukan hasil yang beragam tergantung pada konteks institusional, tingkat pembangunan ekonomi, dan kualitas tata kelola pemerintahan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gupta, Verhoeven, dan Tiongson (1999) menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas pengeluaran publik di sektor sosial dapat mempercepat pencapaian pembangunan manusia, namun menekankan bahwa efisiensi manajerial menjadi faktor penentu utama (Gupta et al., 1998). Sementara itu, Rahmawati dan Intan (2019) menemukan bahwa di tingkat regional, pengeluaran pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan IPM, namun belum mempertimbangkan dimensi manajerial kebijakan publik dalam mekanisme alokasi anggaran dan pelaksanaan program (Rahmawati & Intan, 2020).

Meskipun sejumlah penelitian telah menyoroti hubungan antara pengeluaran pemerintah dan IPM, terdapat perbedaan dari sisi manajemen kebijakan publik. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek ekonomi makro dan hubungan statistik antara variabel fiskal dan pembangunan manusia, tanpa meninjau bagaimana efektivitas pengelolaan kebijakan fiskal dan tata kelola publik memengaruhi hasil pembangunan manusia. Dengan demikian, masih diperlukan kajian yang menempatkan manajemen kebijakan fiskal sebagai instrumen strategis dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi pembangunan manusia di negara berkembang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan manusia di negara berkembang dengan fokus pada tiga sektor utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi berganda untuk menguji hipotesis bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap IPM. Pemilihan negara berkembang sebagai objek penelitian didasarkan pada

karakteristik yang sama dalam hal keterbatasan sumber daya dan kebutuhan akan investasi publik yang signifikan. Kontribusi penelitian ini terhadap literatur ekonomi pembangunan adalah memberikan bukti empiris terbaru mengenai efektivitas manajemen kebijakan fiskal dalam meningkatkan pembangunan manusia di negara berkembang. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy) bagi pengambil keputusan publik untuk mengalokasikan anggaran secara strategis dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan manusia secara berkelanjutan.

## METODE PENELITAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory research untuk menganalisis hubungan kausal antara pengeluaran pemerintah dan pembangunan manusia di negara berkembang. Metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan data panel untuk menguji hipotesis penelitian.

### Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh negara berkembang di dunia. Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut: negara yang diklasifikasikan sebagai negara berkembang menurut Bank Dunia, memiliki data lengkap IPM dan pengeluaran pemerintah untuk periode 2015-2023, dan memiliki stabilitas politik yang relatif baik selama periode observasi. Berdasarkan kriteria tersebut, terpilih 15 negara berkembang sebagai sampel penelitian yaitu Indonesia, Brazil, India, Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam, Meksiko, Argentina, Afrika Selatan, Mesir, Maroko, Tunisia, Kenya, dan Ghana.

### Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (Y) yang diperoleh dari database Human Development Reports UNDP. Variabel independen terdiri dari:

1. Pengeluaran Pemerintah untuk Kesehatan (X1): persentase pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan terhadap PDB
2. Pengeluaran Pemerintah untuk Pendidikan (X2): persentase pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan terhadap PDB
3. Pengeluaran Pemerintah untuk Infrastruktur (X3): persentase pengeluaran pemerintah untuk sektor infrastruktur terhadap PDB
4. Variabel kontrol yang digunakan adalah PDB per kapita (X4) dan tingkat inflasi (X5) untuk mengontrol faktor ekonomi makro yang dapat mempengaruhi pembangunan manusia.

### Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber internasional yang terpercaya:

- Human Development Index: Human Development Reports UNDP
- Pengeluaran Pemerintah: World Bank Open Data dan IMF Government Finance Statistics
- PDB per kapita: World Bank World Development Indicators
- Tingkat Inflasi: IMF World Economic Outlook Database

### Model Analisis

Model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$HDI = \beta_0 + \beta_1 \text{HEALTH} + \beta_2 \text{EDUC} + \beta_3 \text{INFRA} + \beta_4 \text{GDPPC} + \beta_5 \text{INFL} + \varepsilon$$

Dimana:

- HDI = Human Development Index

- HEALTH = Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan (% PDB)
- EDUC = Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (% PDB)
- INFRA = Pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur (% PDB)
- GDPPC = PDB per kapita (USD)
- INFL = Tingkat inflasi (%)
- $\beta_0$  = konstanta,  $\beta_1-\beta_5$  = koefisien regresi,  $\varepsilon$  = error term

#### Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan software statistik Stata 16.0. Tahapan analisis meliputi:

1. Analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data
2. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi
3. Uji pemilihan model panel data (pooled OLS, fixed effect, atau random effect)
4. Estimasi model regresi berganda
5. Uji signifikansi statistik dan ekonomi
6. Interpretasi hasil dan pembahasan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan karakteristik data dari 15 negara berkembang selama periode 2015-2023. Nilai rata-rata IPM untuk sampel negara berkembang adalah 0,685 dengan standar deviasi 0,089. Nilai tertinggi dicapai oleh Argentina (0,825) dan terendah oleh Ghana (0,592).

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian (2015–2023)

Variabel	Mean	Std. Dev	Min	Max
HDI	0,685	0,089	0,592	0,825
Pengeluaran Kesehatan (% PDB)	3,24	1,42	1,8	6,2
Pengeluaran Pendidikan (% PDB)	4,68	1,87	2,1	8,5
Pengeluaran Infrastruktur (% PDB)	2,95	1,23	1,2	5,8
PDB per kapita (USD)	8.247	4.156	2.890	16.420
Inflasi (%)	4,83	3,21	-0,8	14,2

Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan memiliki rata-rata tertinggi sebesar 4,68% dari PDB, diikuti oleh pengeluaran kesehatan (3,24%) dan infrastruktur (2,95%). Variasi pengeluaran antar negara cukup besar, yang mencerminkan perbedaan prioritas kebijakan dan kapasitas fiskal masing-masing negara.

Temuan ini menjelaskan bahwa manajemen kebijakan fiskal di negara berkembang belum sepenuhnya terdistribusi secara proporsional antara kebutuhan jangka pendek dan investasi jangka panjang pembangunan manusia. Tingginya rata-rata pengeluaran pendidikan menunjukkan adanya prioritas strategis pemerintah terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, namun variasi yang besar antarnegara menandakan adanya perbedaan efektivitas implementasi kebijakan publik. Bagi manajer publik dan perencana kebijakan fiskal, hasil ini menegaskan pentingnya pendekatan evidence-based planning untuk menyeimbangkan alokasi antar sektor. Selain itu, stabilitas inflasi yang relatif moderat (rata-rata 4,83%) menunjukkan

ruang fiskal yang potensial untuk memperkuat belanja sosial tanpa menimbulkan tekanan makroekonomi signifikan. Dengan demikian, hasil deskriptif ini memberikan dasar bagi pemerintah untuk merancang strategi manajerial yang lebih adaptif, berorientasi hasil (results-based management), dan terintegrasi dalam kerangka pembangunan manusia berkelanjutan.

### Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk test menunjukkan bahwa residual model terdistribusi normal dengan p-value  $0,087 > 0,05$ . Uji multikolinearitas menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) menunjukkan tidak ada masalah multikolinearitas dengan nilai VIF tertinggi  $2,34 < 10$ . Uji heteroskedastisitas menggunakan Breusch-Pagan test menghasilkan p-value  $0,143 > 0,05$ , menunjukkan tidak ada masalah heteroskedastisitas. Uji autokorelasi menggunakan Durbin-Watson test menghasilkan nilai  $1,89$  yang berada dalam rentang tidak ada autokorelasi.

### Hasil Estimasi Model

Berdasarkan uji Hausman dengan p-value  $0,032 < 0,05$ , model fixed effect dipilih sebagai model terbaik untuk analisis. Hasil estimasi model regresi berganda menunjukkan hasil sebagai berikut.

$$\text{HDI} = 0,412 + 0,031\text{HEALTH} + 0,028\text{EDUC} + 0,025\text{INFRA} + 0,00003\text{GDPPC} - 0,002\text{INFL}$$

Tabel 2. Hasil Estimasi Model Regresi Panel (Fixed Effect Model)

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-stat	P-value
Konstanta	0,412	0,054	7,63	0,000***
Pengeluaran Kesehatan	0,031	0,008	3,88	0,000***
Pengeluaran Pendidikan	0,028	0,006	4,67	0,000***
Pengeluaran Infrastruktur	0,025	0,009	2,78	0,006***
PDB per kapita	0,00003	0,000	5,21	0,000***
Inflasi	-0,002	0,001	-2,14	0,034**

R-squared = 0,758; Adjusted R-squared = 0,741; F-statistic = 43,67 (p-value = 0,000)

Catatan: \*\*\* signifikan pada  $\alpha = 1\%$ , \*\* signifikan pada  $\alpha = 5\%$

### Interpretasi Hasil

Hasil estimasi menunjukkan bahwa seluruh variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Koefisien pengeluaran kesehatan sebesar 0,031 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% pengeluaran kesehatan terhadap PDB akan meningkatkan IPM sebesar 0,031 poin, ceteris paribus. Temuan ini sesuai dengan teori modal manusia yang menyatakan bahwa investasi dalam kesehatan akan meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Koefisien pengeluaran pendidikan sebesar 0,028 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% pengeluaran pendidikan terhadap PDB akan meningkatkan IPM sebesar 0,028 poin. Hasil ini mendukung human capital theory yang dikembangkan oleh Gary Becker, di mana investasi dalam pendidikan akan meningkatkan kemampuan dan keterampilan individu yang pada akhirnya meningkatkan pembangunan manusia.

Koefisien pengeluaran infrastruktur sebesar 0,025 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% pengeluaran infrastruktur terhadap PDB akan meningkatkan IPM sebesar 0,025 poin. Infrastruktur yang baik memfasilitasi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta meningkatkan peluang ekonomi yang pada akhirnya berkontribusi terhadap

pembangunan manusia. Variabel kontrol PDB per kapita menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap IPM, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi tetap relevan dalam meningkatkan pembangunan manusia. Sebaliknya, inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM, menunjukkan bahwa ketidakstabilan ekonomi dapat menghambat upaya pembangunan manusia.

### **Analisis Komparatif antar Negara**

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa efektivitas pengeluaran pemerintah dalam meningkatkan IPM bervariasi antar negara. Brasil memiliki IPM 0,786 pada tahun 2023, meningkat dari 0,76 pada tahun 2022, dengan rata-rata historis 0,702 untuk periode 1980-2023. Indonesia menunjukkan tren positif dengan IPM mencapai 74,39 pada tahun 2023, meningkat 0,62 poin (0,84 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (73,77). Negara-negara dengan tingkat pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi untuk sektor sosial cenderung memiliki IPM yang lebih baik. Namun, kualitas pengeluaran dan efisiensi alokasi anggaran juga memainkan peran yang tidak kalah penting dalam menentukan dampak pengeluaran terhadap pembangunan manusia.

### **Implikasi Kebijakan**

Hasil penelitian memberikan beberapa implikasi kebijakan bagi negara berkembang. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur secara seimbang karena ketiga sektor ini terbukti berkontribusi positif terhadap pembangunan manusia. Kedua, peningkatan pengeluaran harus dibarengi dengan perbaikan kualitas dan efisiensi program untuk memaksimalkan dampak terhadap IPM. Ketiga, pemerintah perlu menjaga stabilitas ekonomi makro, khususnya mengendalikan inflasi, karena terbukti berpengaruh negatif terhadap pembangunan manusia. Keempat, koordinasi antara berbagai sektor dan tingkatan pemerintah diperlukan untuk mengoptimalkan sinergi antar program pembangunan manusia.

### **SIMPULAN**

Penelitian ini membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan manusia di negara berkembang. Ketiga variabel pengeluaran pemerintah, yaitu kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, terbukti berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan pengeluaran kesehatan memberikan dampak terbesar (0,031), diikuti oleh pendidikan (0,028) dan infrastruktur (0,025). Nilai R-squared sebesar 75,8% menunjukkan bahwa sebagian besar variasi IPM dapat dijelaskan oleh faktor-faktor fiskal dan ekonomi yang diteliti. Hasil ini menegaskan relevansi teori ekonomi publik dan human capital theory dalam konteks pembangunan negara berkembang, serta menunjukkan bahwa efektivitas manajemen kebijakan fiskal merupakan faktor kunci peningkatan kualitas sumber daya manusia. Secara praktis, pemerintah perlu mengoptimalkan pengelolaan anggaran melalui pendekatan outcome-based budgeting dan tata kelola fiskal yang transparan untuk memaksimalkan dampak pembangunan manusia. Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan 15 negara dan periode observasi 2015–2023. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan analisis baik secara geografis maupun temporal, sekaligus mempertimbangkan faktor-faktor kelembagaan seperti kualitas tata kelola, kapasitas birokrasi, dan inovasi kebijakan publik. Selain itu, pengembangan studi di masa depan sebaiknya mengakomodasi peran digitalisasi layanan publik dan keterlibatan masyarakat

sebagai variabel kontekstual yang dapat memperkuat efektivitas kebijakan fiskal terhadap pembangunan manusia berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bank Dunia. (2024). World Development Indicators Database. Washington, DC: World Bank Group.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 2023. Jakarta: BPS.
- Bangun, W., Calista, C., Br Ginting, A. A., & Simanjuntak, B. (2024). Pembangunan Sumber Daya Manusia: Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi. *Journal of Syntax Literate*, 9(7).
- Damayanti, S. (2018). *Analisis pengaruh pengeluaran penduduk, pengeluaran pemerintah, dan rasio ketergantungan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia*.
- Gupta, S., Clements, B., & Tiongson, E. (1998). *Public Spending on Human Development*. 10–13.
- Huda, R. A., Puspita, R. A., Hasanah, S. N., & Malik, A. (2024). Peran Kebijakan Fiskal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Indonesia Sebagai Negara Berkembang. 7(2). <https://doi.org/10.52655/khg.v7i2.102>
- International Monetary Fund. (2019). Multiple dimensions of human development index and public social spending for sustainable development. IMF Working Paper WP/19/205.
- Mongan, J. J. S. (2019). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia*. 4(2), 163–176. <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i2.122>
- Prasetyoningrum, A. K., & Sukmawati, U. S. (2018). Analisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 217–240.
- Putra, S. K., Setiani, W., Astuti, D., & Pangestoeti, W. (2025). Analisis Peran Pemerintah dalam Perekonomian Nasional melalui Tiga Fungsi Utama Fiskal: Alokasi, Distribusi, dan Stabilitas. *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN*, 3(6), 408–416.
- Rahmawati, F., & Intan, M. N. (2020). Government Spending, Gross Domestic Product, Human Development Index (Evidence from East Java Province). *KnE Social Sciences*, 774–786. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i6.6641>
- Retnowati, D. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. 520-530, 2(2). <https://doi.org/10.56799/ekoma.v2i2.3113>
- Sari, A. I. C., Fithah, Z., & Tukiran, M. (2022). Pengaruh anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di indonesia. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 9(2), 127–136.
- Setiawan, M. B. (2022). Indeks pembangunan manusia Indonesia. *Jurnal Economia*. <https://www.academia.edu/download/86392988/1178.pdf>
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. New York: Anchor Books.
- Siagian, M., & Panjaitan, M. (2021). The effect of government spending on the human development index in Simalungun Regency. *International Journal of Research and Review*, 8(12), 425–432.
- Simarmata, Y. W., & Iskandar, D. D. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Jumlah Penduduk, Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia: Analisa Two Stage Least Square Untuk Kasus Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 5(1), 78–94.
- United Nations Development Programme. (2024). *Human Development Report 2024: The Uncertain Times, Unsettled Lives*. New York: UNDP.
- World Bank. (2023). Government Expenditure Database. Washington, DC: World Bank Group